

## ANALISI PENERAPAN APLIKASI EPRA (EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR INSPEKTORAT DAERAH KOTA MANADO

Angelica F Lalendim<sup>1</sup>, Raykes Hinrich Tuerah<sup>2</sup>, Belthasar Trito Siahaan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Negeri Manado

Email : [angelicalamansiang@gmail.com](mailto:angelicalamansiang@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to examine how the EPRA application is implemented in the preparation of financial reports at the Regional Inspectorate Office of Manado City. EPRA is a web-based digital system developed to facilitate the monitoring, evaluation, and reporting of budget realization in a systematic, accurate, and transparent manner, particularly in the preparation of local government financial statements. The research was conducted at the Regional Inspectorate Office of Manado City using a descriptive qualitative approach, with both primary and secondary data sources. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation related to the use of the EPRA application in the financial reporting process. The result of the study indicate that the implementation of the EPRA application has had a significant impact on improving the quality of financial reporting. This is evidenced by easier access to information, improved timeliness of reporting, and enhanced accuracy and accountability in budget recording. However, several challenges still hinder system optimization, such as limited technical skills among staff and occasional technical disruptions in the application. The researcher recommends that to achieve more optimal results, efforts should be made to enhance users technical capacity through ongoing training, as well as conduct regular system maintenance and upgrades to support the smooth operation of the application.*

**Keywords:** Analysis, EPRA Application, Financial Reports.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi EPRA dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Aplikasi EPRA merupakan sebuah sistem digital berbasis web yang dikembangkan untuk mempermudah proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi anggaran secara sistematis, akurat, dan transparan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi EPRA memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan. Hal ini terlihat dari adanya kemudahan dalam akses informasi, ketepatan waktu pelaporan, serta meningkatnya akurasi dan akuntabilitas dalam pencatatan anggaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi sistem, antara lain keterbatasan kemampuan teknis sumber daya manusia serta gangguan teknis yang sesekali muncul pada sistem aplikasi. Peneliti memberikan rekomendasi pada perusahaan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan upaya peningkatan kapasitas teknis

pengguna melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta perbaikan sistem secara periodik guna mendukung kelancaran operasional aplikasi secara menyeluruh.

**Kata-kata Kunci:** Analisis, Aplikasi EPRA, Laporan Keuangan.

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat lokal yang bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan sistem informasi yang diterapkan dilingkungan pemerintah daerah, termasuk aplikasi EPRA, harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terciptanya tata kelola yang baik. LKPD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan APBD (Alrahim & Wibowo, 2022).

Menurut (Sumanti et al., 2022), dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Permasalahan tersebut menyebabkan proses pelaporan keuangan belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengelola berbagai potensi daerah, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dituntut untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tersebut mencakup transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas, yang menjadi landasan penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aplikasi EPRA merupakan sistem berbasis web yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Sistem ini dirancang tidak hanya sebagai alat pelaporan semata, tetapi juga sebagai sarana evaluatif yang memungkinkan setiap perangkat daerah memantau progres pelaksanaan kegiatan secara real-time, mulai dari tahap perencanaan hingga pencapaian target keuangan dan fisik. Dengan fitur-fitur seperti pelaporan rencana kas, input data realisasi fisik dan keuangan, hingga cetak otomatis laporan realisasi anggaran, EPRA diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan manual serta mempercepat penyusunan laporan keuangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemanfaatan aplikasi ini secara tepat menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Penelitian oleh Natalia Mamengko (2022) sebelumnya telah mengkaji penggunaan aplikasi EPRA pada aspek pengawasan realisasi anggaran di salah satu perangkat daerah dan menekankan pentingnya peran sistem informasi dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai kontribusi aplikasi EPRA terhadap pengawasan secara umum, namun belum secara spesifik membahas dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan, baik dari sisi efektivitas maupun kendala penerapannya. Penelitian ini memiliki perbedaan utama dari sisi fokus dan ruang lingkup kajian. Jika penelitian Natalia lebih menyoroti peran aplikasi EPRA dalam mendukung pengawasan anggaran secara menyeluruh, maka penelitian ini secara lebih spesifik mengarahkan perhatian pada bagaimana aplikasi EPRA diterapkan

dalam proses penyusunan laporan keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Penelitian ini juga menelusuri faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan aplikasi, serta menganalisis sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dan kualitas hasil laporan keuangan.

Penelitian mengenai aplikasi EPRA juga telah dilakukan oleh (Goni et al., 2020), menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran melalui sistem tersebut di Pemerintah Kota Manado secara umum. Fokus penelitian tersebut berada pada aspek keterbukaan informasi kepada publik dan aksesibilitas data anggaran melalui aplikasi EPRA. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana sistem ini digunakan secara teknis dalam proses penyusunan laporan keuangan oleh instansi pengawasan internal. Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian ini secara khusus meneliti analisis penerapan aplikasi EPRA dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas operasional sistem dalam mendukung akurasi laporan keuangan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaannya, serta mengevaluasi sejauh mana aplikasi ini mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan anggaran.

Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk dalam aspek pelaporan keuangan. Oleh karena itu penerapan aplikasi EPRA dalam proses penyusunan laporan keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado menjadi objek penting untuk dianalisis. Evaluasi terhadap penerapan ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem berjalan efektif dan apa saja tantangan yang dihadapi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami penerapan aplikasi EPRA secara lebih mendalam dan memberikan masukan bagi peningkatan sistem pelaporan keuangan daerah. Atas dasar itulah, penulis mengangkat judul “Analisis Penerapan Aplikasi EPRA dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado”.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. LKPD bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja dan kondisi keuangan pemerintah daerah, serta sebagai alat pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah merupakan laporan terstruktur yang mencakup berbagai aspek keuangan, seperti: rincian pendapatan dan belanja, posisi keuangan, perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas laporan keuangan. LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan bertujuan untuk: memberikan gambaran kinerja dan kondisi keuangan daerah, menunjukkan akuntabilitas, memfasilitasi pengambilan keputusan, memenuhi kebutuhan informasi bagi berbagai pihak.

Menurut (Siahaan & Simanjuntak, 2020), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Menurut (Alrahim & Wibowo, 2022), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan APBD.

Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

## 2. Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem informasi akuntansi pemerintah daerah (Pemda) merupakan sebuah mekanisme terpadu yang berfungsi untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan data keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran publik. Sistem ini dibangun untuk mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks pemerintah daerah, sistem ini menjadi sarana utama dalam pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar nasional dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem informasi keuangan daerah wajib diselenggarakan secara terintegrasi dalam rangka mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk pencatatan akuntansi, harus dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi yang andal, seperti aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurut (Alamsyah dan Kurniawan, 2021), sistem informasi akuntansi pemerintah daerah membantu dalam mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah pengawasan dan audit internal. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari kesalahan pencatatan manual dan meminimalkan risiko manipulasi data anggaran.

Dalam penerapannya, sistem informasi akuntansi Pemda memungkinkan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan sistem ini, laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan laporan lainnya dapat dihasilkan secara sistematis dan sesuai waktu.

Di lingkungan Pemerintah Kota Manado, salah satu bentuk implementasi sistem informasi akuntansi adalah melalui penggunaan aplikasi EPRA. Aplikasi ini berperan sebagai alat bantu dalam proses pencatatan realisasi anggaran serta pelaporan keuangan berbasis kas yang akurat dan tepat waktu. Dengan sistem EPRA, Kantor Inspektorat Daerah dapat menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi anggaran secara lebih efisien dan terukur.

## 3. Aplikasi EPRA

Aplikasi EPRA adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengawasi realisasi anggaran. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pelaporan realisasi anggaran, baik ditingkat kota maupun kabupaten. Aplikasi EPRA juga merupakan sebuah aplikasi berbasis digital yang digunakan oleh pemerintah daerah di kota Manado. Aplikasi EPRA merupakan sistem yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

Aplikasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan transparasi, akurasi, dan efisiensi dalam proses perencanaan serta pengelolaan anggaran, sehingga meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan dana. Aplikasi EPRA dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintahan daerah. Menurut penelitian

sebelumnya, penerapan aplikasi EPRA dapat meningkatkan efisiensi kerja karena sistem ini mampu mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, aplikasi EPRA juga mendukung integrasi data keuangan antar unit kerja, sehingga mempermudah dalam pengawasan dan evaluasi anggaran.

Laporan realisasi anggaran menjadi salah satu komponen utama dalam pelaporan keuangan pemerintah. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Tujuannya adalah agar para pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi sejauh mana realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan transfer dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta memastikan bahwa kegiatan keuangan pemerintah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis penerapan aplikasi EPRA dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Menurut (Adlini et al., 2022), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu realitas dengan pendekatan berpikir induktif.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai yang menggunakan aplikasi EPRA di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, serta data sekunder dari buku, jurnal, internet dan observasi lapangan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara langsung dengan salah satu pegawai yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan menggunakan aplikasi EPRA, observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan proses pelaporan keuangan melalui aplikasi EPRA.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan mengumpulkan data, mengelompokkan data yang sesuai dengan fokus penelitian, menjelaskan data secara naratif atau dengan kata-kata dari temuan yang sesuai dengan teori dan diakhiri dengan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

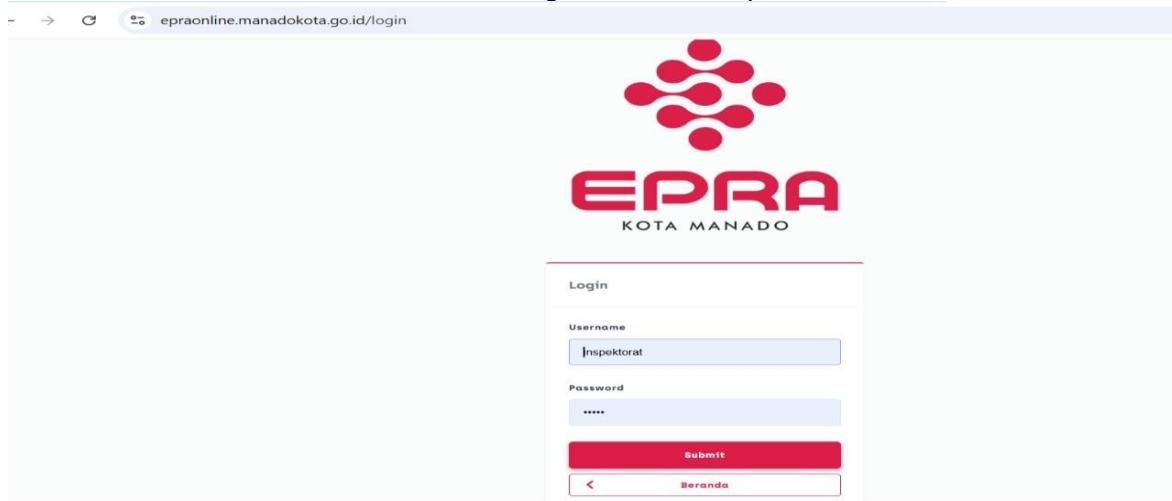
### 1. Proses login ke Sistem Aplikasi EPRA

Tahap awal penggunaan aplikasi EPRA dimulai dengan proses login yang dilakukan oleh pengguna sesuai hak akses yang telah ditentukan. Masing-masing pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan anggaran diberikan akun tersendiri berupa username dan password, sebagaimana ditampilkan pada gambar dibawah. Mekanisme ini bertujuan menjaga keamanan data serta membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang. Berikut langkah-langkah untuk login:

- 1) Buka aplikasi EPRA melalui portal resmi Inspektorat Daerah Kota Manado.
- 2) Masukan usename dan password yang telah diberikan oleh administrator sistem.
- 3) Klik tombol "login" untuk masuk ke dashboard utama.
- 4) Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke beranda atau menu utama aplikasi EPRA.



Gambar 1. Proses Login ke Sistem Aplikasi EPRA



Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

## 2. Penginputan Data Pagu Anggaran

Tahapan selanjutnya adalah pengisian data pagu anggaran yang mengacu pada dokumen perencanaan resmi, yakni Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Operator dari masing-masing bidang melakukan input data tersebut secara langsung ke dalam sistem menggunakan fitur yang telah tersedia. Pada semester pertama tahun 2025, jumlah pagu anggaran yang tercatat mencapai Rp20.669.053.941, sebagaimana ditampilkan pada gambar dibawah. Informasi ini menjadi landasan dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Gambar 2. Data Pagu Anggaran

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

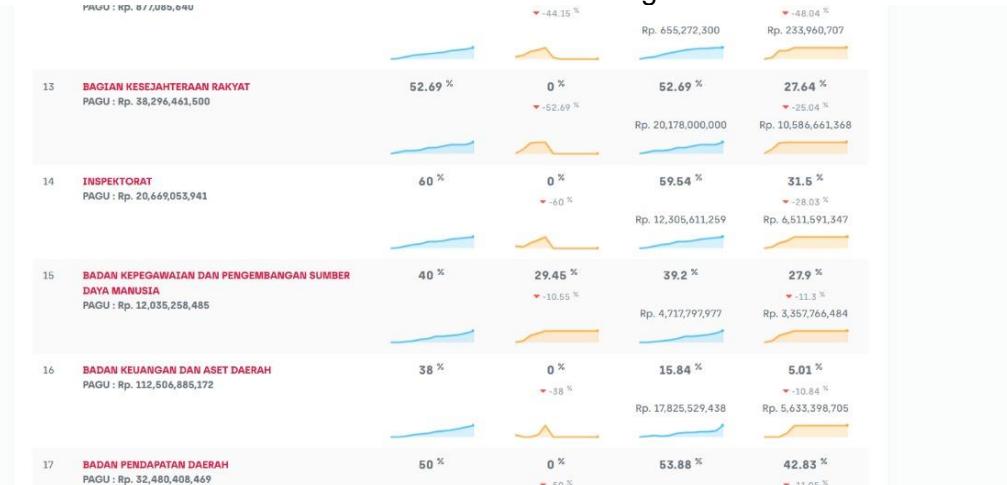
## 3. Pengisian Realisasi Fisik dan Keuangan

Setelah penginputan data pagu, pengguna melanjutkan ke tahapan pencatatan realisasi kegiatan, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Berdasarkan data yang diinput



mencapai 60%, sementara realisasi keuangannya baru mencapai 31,5% atau sekitar Rp6,51 miliar, sebagaimana ditampilkan pada gambar dibawah. Ketidakseimbangan antara dua indikator ini menjadi catatan penting, karena menunjukkan perlunya peningkatan dalam efektivitas penyerapan anggaran agar sejalan dengan kemajuan fisik kegiatan.

Gambar 3. Realisasi Fisik dan Keuangan



Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

#### 4. Target Fisik dan Keuangan

Aplikasi EPRA juga menyediakan fitur untuk penetapan target fisik dan keuangan setiap bulan, yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam proses evaluasi kinerja anggaran. Dari hasil input data, terlihat bahwa target keuangan akumulasi dari 4,83% dan target fisik akumulasi 5% di bulan Januari mengalami peningkatan secara bertahap hingga 59,54% target keuangan akumulasi dan 60% target fisik akumulasi di bulan Juni 2025, sebagaimana ditampilkan pada gambar dibawah. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan intensitas kegiatan, dan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran perlu disusun secara realistik agar target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai waktu yang direncanakan.

Gambar 4. Target Fisik dan Keuangan

#	Bulan TA 2025	Pagu [Rp]	Target Keuangan		Target Keuangan Akumulasi [%]	Target Fisik Akumulasi [%]
			Bulan Berjalan	Akumulasi		
1.	Januari	Rp. 2282	Rp. 11012879	Rp. 11012879	4.83	5
2.	Februari	Rp. 2282	Rp. 20269017	Rp. 312811	13.71	14
3.	Maret	Rp. 2282	Rp. 29795230	Rp. 61077	26.76	27
4.	April	Rp. 2066	Rp. 13179981	Rp. 74257	35.93	37
5.	Mei	Rp. 2066	Rp. 19417875	Rp. 93674	45.32	46
6.	Juni	Rp. 2066	Rp. 29381126	Rp. 12305	59.54	60

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

#### 5. Pengisian Rencana Realisasi Anggaran Kas (RAK)



Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi  
Anggaran Kas (RAK), yang berguna untuk mempermudah kebutuhan kas setiap bulan.

Pada bulan Januari 2025, realisasi kas tercatat sebesar 83,23%, namun kemudian menurun hingga hanya mencapai 32,79% pada bulan Mei, sebagaimana ditampilkan pada gambar dibawah. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa perencanaan kas belum sepenuhnya akurat dan konsisten dengan kebutuhan aktual di lapangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak menghambat pelaksanaan program.

Gambar 5. Rencana Realisasi Anggaran Kas (RAK)

#	Bulan TA 2025	RAK PD [Rp]		RAK Target [Rp]		Realisasi Keuangan Bulan Berjalan [Rp]		Sisa RAK [Rp]		Realisasi RAK [%]	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
1.	Januari	Rp. 11012		Rp. 110128		Rp. 916653169		Rp. 18463		83.23	%
2.	Februari	Rp. 20265		Rp. 221153		Rp. 800383633		Rp. 14111		36.19	%
3.	Maret	Rp. 29795		Rp. 439067		Rp. 1953435387		Rp. 24372		44.49	%
4.	April	Rp. 23179		Rp. 475523		Rp. 959775096		Rp. 37954		20.18	%
5.	Mei	Rp. 19417		Rp. 573725		Rp. 1881344062		Rp. 38559		32.79	%

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

## 6. Verifikasi dan Validasi Data

Setelah proses input data selesai dilakukan oleh operator, tahap berikutnya dalam penggunaan aplikasi EPRA adalah verifikasi dan validasi oleh pejabat teknis yang berwenang di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Manado. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang telah dimasukkan ke dalam sistem telah sesuai dengan dokumen sumber yang sah, seperti DPA, laporan realisasi kegiatan, dan bukti pendukung lainnya. Proses verifikasi dan validasi ini sangat penting karena menjadi dasar penetapan data final yang akan digunakan dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, kualitas data dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan dapat terjaga dengan baik.

## 7. Monitoring dan Evaluasi

Setelah data divalidasi, sistem EPRA mendukung proses monitoring dan evaluasi secara menyeluruh. Melalui fitur pemantauan yang tersedia, pengguna dapat melihat sejauh mana progres realisasi kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi disajikan secara real-time dan terstruktur, sehingga memudahkan pimpinan dalam melakukan evaluasi kinerja program, serta mengambil tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dari rencana anggaran. Fungsi monitoring ini juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data aktual.

## 8. Penyusunan dan Pencetakan Laporan Keuangan

Tahapan akhir dalam penggunaan aplikasi ini adalah penyusunan dan pencetakan laporan keuangan, termasuk laporan evaluasi kinerja yang dihasilkan langsung dari sistem. Laporan yang tercetak menjadi dokumen resmi yang disampaikan kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Selain itu, laporan ini juga digunakan oleh Inspektorat sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan

audit internal, untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan secara transparan, efisien, dan akuntabel.



Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi  
menghasilkan laporan keuangan yang mencakup informasi pagu, realisasi keuangan, persentase capaian, serta target dan realisasi fisik. Berikut adalah laporan keuangan semester I tahun 2025 yang dihasilkan aplikasi EPRA:

Tabel 1. Laporan Keuangan yang dihasilkan Menggunakan Aplikasi EPRA

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Realisasi	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Pengawasan Rutin OPD	5.500.000.000	1.800.000.000	32,73%	50%	60%
2.	Audit Kinerja	3.200.000.000	1.100.000.000	34,38%	45%	58%
3.	Pemeriksaan Kasus Khusus	2.500.000.000	750.000.000	30,00%	40%	55%
4.	Sosialisasi dan Pelatihan Pengawasan	1.800.000.000	600.000.000	33,33%	50%	62%
5.	Operasional dan Dukungan Administratif	7.669.053.941	2.260.000.000	29,47%	55%	61%
6.	<b>Total</b>	<b>20.669.053.941</b>	<b>6.510.000.000</b>	<b>31,50%</b>	<b>50%</b>	<b>60%</b>

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Aplikasi EPRA di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah cukup efektif dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur, real-time, dan transparan. Fitur-fitur seperti input anggaran, pencatatan target dan realisasi, validasi data, serta penyusunan laporan otomatis telah memberikan efisiensi terhadap pelaksanaan tugas keuangan. Namun, efektivitas ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterlambatan penginputan data, koordinasi antar unit kerja yang belum optimal, keterbatasan perangkat teknologi dan infrastruktur jaringan, serta kurangnya pemahaman teknis dari sebagian pegawai terhadap penggunaan aplikasi.

Permasalahan utama yang diidentifikasi tidak terletak pada sistem EPRA itu sendiri, melainkan pada kesiapan internal organisasi, khususnya dalam aspek sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur. Hambatan-hambatan ini berdampak pada kurang maksimalnya pemanfaatan aplikasi dalam menghasilkan laporan yang tepat waktu dan akurat. Meski demikian, penerapan EPRA tetap memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan anggaran di lingkungan Inspektorat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan teknis secara berkala bagi seluruh operator dan pegawai yang terlibat, guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap sistem. Kedua, penguatan sarana pendukung seperti komputer, koneksi internet, dan perangkat lunak yang stabil menjadi penting untuk menjamin kelancaran operasional sistem. Ketiga, diperlukan peningkatan koordinasi antar bidang, khususnya dalam penyampaian target dan laporan realisasi, agar proses verifikasi dan pelaporan

dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- 
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Alamsyah, M. R., & Kurniawan, B. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Akuntansi*, 23(1), 112–120.
- Alrahim, A. A., & Wibowo, P. (2022). Analisis manfaat laporan keuangan berbasis Akrual dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(3), 80–93. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i3.18579>.
- Goni, I. S., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Transparansi Pengelolaan Anggaran Melalui Aplikasi Web Cerdas Epra Online (Ceo) Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31424%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/31424/30083>.
- Natalia Mamengko, D. (2022). Pelaporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi Epra (Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Di Kabupaten Minahasa. *SIBATIK JURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 63–70. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.497>.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu). *Jurnal Manajemen*, 6(2), 129–138.
- Sumanti, A. O., Sondakh, J. J., & Kapojos, P. M. (2022). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado Analysis of Regional Financial Statement Presentation Based on Government Accounting Standards at the Manado City. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (EKonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum)*, 5(2), 381–388.